LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN MALILI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Malili dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penysunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Malili sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Malili Tahun 2023 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Malili, Februari 2024

CAMAT MALILI

NASIR, SP.,M.Si
NIP. 19850807 201001 1015

BAB I
PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Malili selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Malili diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Malili menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kecamatan Malili 830,379 km^2 atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.Kecamatan Malili terdiri dari 14 (Empatbelas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan, dengan 52 dusun/lingkungan dan 139 RT. Adapun Desa/Kelurahan dimaksud masing-masing :

1. Kelurahan Malili
2. Desa Baruga
3. Desa Balantang
4. Desa Wewangriu
5. Desa Laskap
6. Desa Pongkeru
7. Desa Harapan
8. Desa Pasi-pasi
9. Desa Puncak Indah
10. Desa Ussu
11. Desa Atue
12. Desa Manurung
13. Desa Tarabbi
14. Lakawali
15. Lakawali Pantai

Jumlah Penduduk Kecamatan Malili pada tahun 2021 sebanyak 42.308 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2021) dengan rincian : laki-laki sebanyak 21.874 jiwa dan perempuan sebanyak 20.434 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 11.276 KK. Penduduk Kecamatan Malili merupakan penduduk yang heterogen baik Suku maupun Agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Malili yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

1.2 Data Umum Organisasi

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Malili dan Kantor Kelurahan Malili per tanggal 31 Desember 2023 adalah 14 (empat belas) orang PNS dan 16 (enam belas) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. **Berdasarkan Golongan**

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	-	-	-	1
2	Golongan III	4	4	2	1	11
3	Golongan II	-	-	1	1	2
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		5	4	3	2	14

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. **Berdasarkan Pendidikan**

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	JUMLAH
1	Golongan IV	1	-	-	-	1
2	Golongan III	-	10	1	-	11
3	Golongan II	-	-	-	2	2
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	10	1	2	14

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	JUMLAH
1	Struktural	-	7	1	6	14
2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		**-**	**7**	**1**	**6**	**14**

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	14
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	UPAH JASA	16
JUMLAH		**30**

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.3. Struktur/Kondisi Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN MALILI

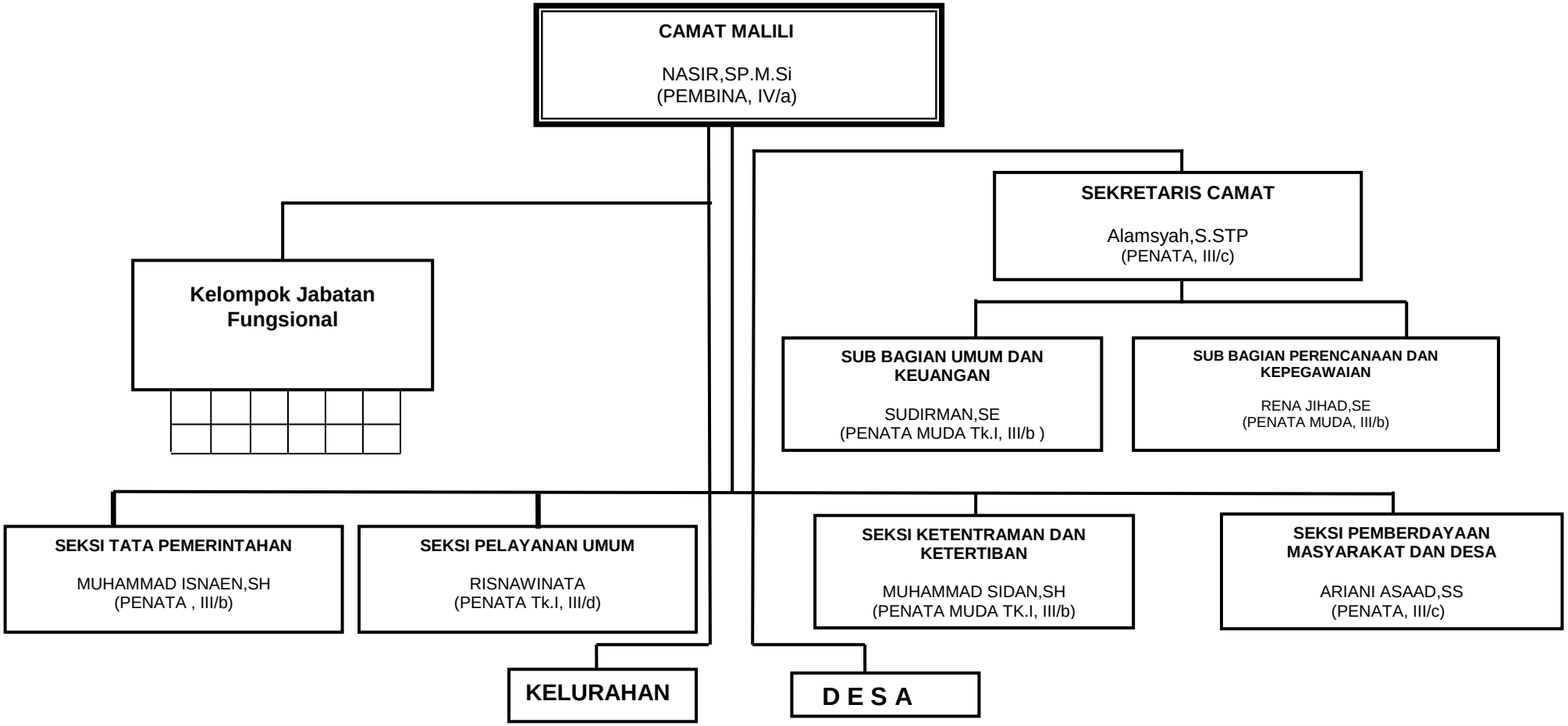

1.4. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja KecamatanKabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.5. Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Malili tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Malili yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat,diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

‘

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Malili Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Malili.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

❖ Visi dan Misi

Pada dasarnya. rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Malili sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

"Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kecamatan Malili menyusun Perjanjian Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Malili Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Renja Tahun 2023 dan DPA Tahun Anggaran 2023. Kecamatan Malili telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	**Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili**	**Survei Kepuasan Masyarakat**	**93,00**
2.	**Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili**	**Nilai LAKIP**	**65.15**

NO	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp. 3.527.179.061**	**APBD**
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Rp. 7.274.400**	**APBD**
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Rp. 390.203.700**	**APBD**
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Rp. 19.877.550**	**APBD**
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Rp. 54.478.839**	**APBD**
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Rp. 24.182.700**	**APBD**

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tabel 2.2
APBD Perubahan Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**7.274.400**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**100%**	**7.274.400**
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	12 lembar	7.274.400
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**100%**	**390.203.700**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**100%**	**95.321.800**
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	40 Org	32.006.800
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Org	63.006.800
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**100%**	**294.881.900**
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 Kegiatan	142.335.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	152.546.900
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100%**	**19.877.550**

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100%**	**14.875.450**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kali	11.882.700
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Kali	2.992.750
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	5.002.100
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Kali	5.002.100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**100%**	**54.478.839**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**100%**	**54.478.839**
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Kali	54.478.839
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	**24.182.700**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	**24.182.700**
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	15 Desa / Kelurahan	24.182.700

	Kecamatan		
Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**3.527.179.061**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**54.255.900**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	40.761.300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.001.600
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.089.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.403.200
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**2.160.209.312**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	21 Orang	2.118.665.432
	Koordinasi dan Penyusunan laporam Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	41.543.880
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**100%**	**18.734.920**
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	**18.734.920**
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**54.771.669**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	10.731.669

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	44.040.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**663.003.450**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	9.485.300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Jenis	63,618,100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20000 lbr	11.430.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Jenis	11.900.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3500 Orang	130.635.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Kali	435.935.050
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**459.788.810**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	19.508.810
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16 Rek	107.280.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35 Org	333.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**116.415.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	36.115.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	17.800.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	62.500.000
JUMLAH		**100%**	**4.023.196.250**

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tomoni

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Pemerintah Kecamatan Tomoni yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026

KANTOR KECAMATAN MALILI

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)	Nilai	Survey Kepuasan Masyarakat = $\frac{\text{Total Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$ x Nilai Penimbang	Kuisioner	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pelayanan Umum
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Nilai Lakip	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Laporan Kegiatan	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pelayanan Umum, Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Subbagian Umum dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026

KANTOR KECAMATAN MALILI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Transisi 2021	TARGET					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Malili	Tingkat pertumbuhan IKM			92	92.7	92.9	93.05	93.10	94	94
			Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	92.27	93.00	93.05	94	94.5	94.5
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan	Nilai LAKIP Kecamatan			60.18	65.5	65.15	66	67	72	72
			Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Capaian IKU Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output,outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pencapaian terhadap IKU Kantor Kecamatan Malili akan digambarkan per Sasaran Strategis, sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu ”**Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik**”, dan tujuan **”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Malili sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan public di tingkat kecamatan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,00	93.26	100,28%	Tinggi

Sumber :Seksi Pelayanan Umum

$$\text{Rumus : \% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

a. Analisis Capaian kinerja sasaran pertama sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian mencapai 100,28% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah baik. Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2023 Kecamatan Malili berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan Kecamatan Malili, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target *93,00* atau melampaui target dengan nilai survei *93.26* (daftar terlampir). Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Malili.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diperioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

1) Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur kualitas sarana dan prasarana dengan nilai ***760****.*
   - ❖ **Faktor penghambat** kenapa kecamatan Malili pada unsur kualitas sarana dan prasarana mendapat nilai paling rendah disebabkan karena kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta berkualitas.
   - ❖ **Solusi** untuk permasalahan unsur kualitas sarana dan prasarana adalah dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan layak agar tercipta kepuasan masyarakat yang lebih baik
2) Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur penanganan pengaduan pengguna pelayanan dengan nilai ***860***.
   - ❖ **Faktor pendukung** Kecamatan Malili pada unsur penanganan pengaduan pengguna pelayanan mendapat nilai tinggi, disebabkan karena memang pelayanan di kantor kecamatan malili menggunakan prosedur tatacara pelayanan dimana setiap pengaduan masyarakat dicatat dalam register pengaduan dan kemudian segera meneruskan ke pimpinan

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2019	80.45	81.25	Tinggi
2		2020	81.25	88.05	Tinggi
3		2021	81.25	88.05	Tinggi
4		2022	92.27	93.26	Tinggi
5		2023	93.00	93.26	Tinggi

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

GRAFIK TARGET DAN REALISASI IKM

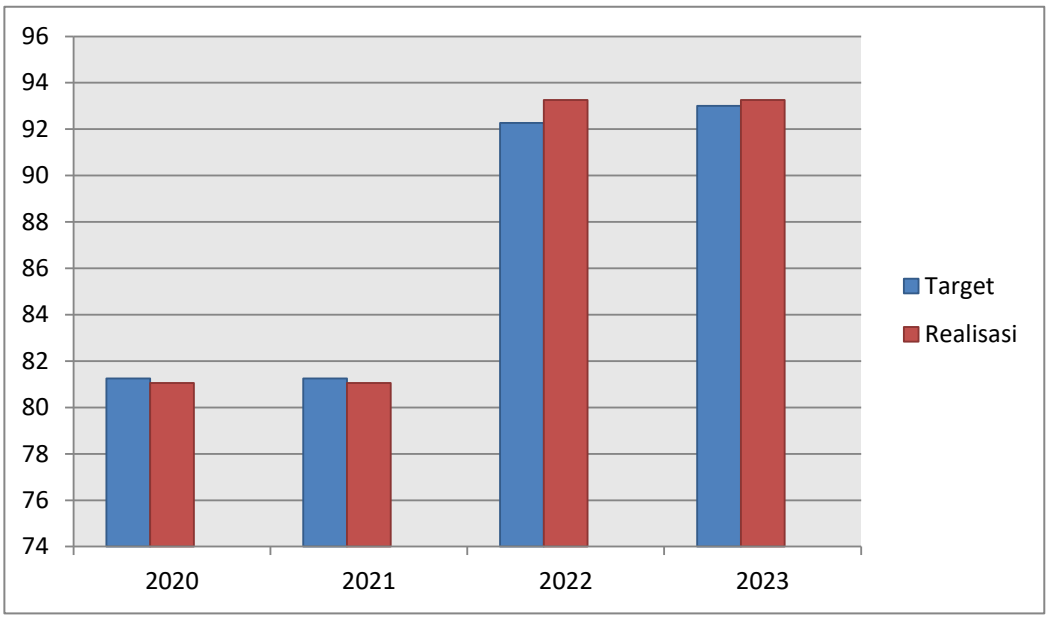

Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023. Pada setiap tahunnya realisasi Survei Kepuasan Masyarakat ada yang mengalami penurunan serta peningkatan dan melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2023 Terhadap Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2022	2022	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Indeks Kepuasan Masyarakat	93.00	93.26	94,5

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2023 sebesar 93,26 atau setara dengan 100,08% dengan Predikat Tinggi, Target nilai IKM pada akhir periode Resntra 2021-2026 yaitu 94.5, jika Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2023 adalah 101,33%. Target ditahun 2023 memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Malili untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Malili dapat terwujud.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan.

Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat yaitu :

a. Keterbatasan SDM dimana tidak semua pegawai di kantor camat malili memahami prosedur pelayanan
b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Malili dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu:

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada tahun 2022 untuk kegiatan perizinan pelaksanaannya tidak lagi di Kecamatan, namun untuk pelayanan umum lainnya masih tetap difasilitasi di kecamatan seperti surat ahli waris, keterangan pindah penduduk serta pengantar pembuatan KTP

❖ **Hambatan :**

a) Masih kurangnya tenaga SDM dan sarana dan prasana yang memadai.

❖ **Solusi :**

a) Perlu dilakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Koordianasi kegiatan pemberdayaan Desa

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan musrembang mencapai 90%. Musrenbang Kecamatan Malili dilaksanakan pada Bulan Februari 2023, masing-masing Desa/Kelurahan mengusulkan sebanyak 5 kegiatan prioritas dengan total 150 usulan. Setelah dilakukan musyawarah dan verifikasi oleh BAPPEDA, usulan yang terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 30 kegiatan prioritas.

❖ **Hambatan :**

a) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan musrembang serta menyampaikan usulan dalam musrenbang.

❖ **Solusi :**

a) Memberikan pemahaman kepada tokoh perempuan terkait pelaksanaan musrenbang.

b. Peningkatan efektifitas kagiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiata PKK pada 14 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Malili. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu :

a) Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan;
b) Memfasilitasi Program / Kegiatan PKK Desa/Kelurahan;
c) Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan.

Sepanjang tahun 2023 PKK kecamatan Malili melakukan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Kampung Organik, Lomba Dasawisma dan Lomba Posyandu terintegrasi. Kegiatan PKK pada tahun 2022 sebagian besar berkaitan dengan penertiban administrasi PKK Desa/Kelurahan dan beberapa perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

❖ **Hambatan :**

a) Sumber Daya Manusia terbatas.

❖ **Solusi :**

a) Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapsitas Sumber Daya Manusia.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di kelurahan Malili pada tahun 2023 adalah pemeliharaan Bangunan Bank Sampah.

❖ **Hambatan :**

a) Terbatasnya anggaran sehingga dilaksanakan secara bertahap

❖ **Solusi :**

b) Tetap melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan malili pada tahun 2023 yaitu peningkatan kegiatan aparatur satlinmas, serta pembinaan pada kelompok umkm yang ada di Kelurahan Malili.

❖ **Hambatan :**

a) Belum ada data lengkap yang berkaitan dengan kelompok masyarakat yang ada di kelurahan yang dapat diberdayakan

❖ **Solusi :**

a) membentuk dan mendata kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat mempermudah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di keluarahan malili

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka)

adalah semua rekomendasi yang masuk dikecamatan 100 % harus diselesaikan. Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimka dilakukan apabila terdapat persoalan yang harus dibahas oleh lintas sektor se-Kecamatan Malili. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam rapat Forkopimka Tahun 2023 :

a) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait peningkatan mutu dan pelayanan Kesehatan termasuk penanganan stunting di Kecamatan Malili
b) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Malili
c) Menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan shalat Idul Fitri
d) Persiapan HUT Republik Indonesia ke 76
e) Rapat Koordinasi Forkopimca dengan Bupati Luwu Timur.

❖ **Hambatan :**

a) Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa/kelurahan dan unit kerja lingkup Kecamatan Malili belum maksimal.

❖ **Solusi:**

a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait.

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordianasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas

pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan demi meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa. Sebelum dicairkan, APBDes diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD. Setiap Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Malili untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes. Pencairan APBDes dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran.

- **Hambatan :**
  a) Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes.
  b) Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan.
  c) Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa.
- **Solusi :**
  a) Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait.
  b) Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya.
  c) Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal untuk mewujudkan masyarakat aman dan tentram di wilayah kecamatan malili, kerjasama ini tidak hanya pada bidang keamanan namun juga bidang-bidang lain dalam mengawal program pemerintah

- **Hambatan :**
  a) Kurangnya pemahaman masyarakat sehingga masih ada hewan peliharaan yang berkeliaran
  b) Masih tingginya kenakalan remaja
- **Solusi :**
  d) Melakukan sosialisasi di masyarakat terkait perda hewan ternak
  e) Melakukan pendekatan dengan remaja di masing2 desa

b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Target dalam sub kegiatan ini adalah melakukan pertemuan dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan untuk menjalin informasi dalam upaya pencegahan pelanggaran dan norma norma ditengah masyarakat kecamatan malili. Kecamatan Malili melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.

- **Hambatan :**
  a) Masih adanya pernikahan dibawah umur
- **Solusi :**
  f) Melakukan sosialisasi di masyarakat terkait perda pernikahan dibawah umur

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Target dalam sub kegiatan ini adalah koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kecamatan malili melakukan pertemuan dengan polri, TNI, Satpol PP dalam rangka penegakan perda yang ada untuk menata dan mengatur tatanan sehingga terwujud kenyamanan dan keindahan di wilayah kecamatan malili

- **Hambatan :**

a) Masih banyak warga yang membangun rumah tinggal tidak sesuai perda.

- **Solusi :**

a) Melakukan sosialisasi terkait Perda

Sasaran 2.	**Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu ”**Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik**”, dan tujuan **”Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Malili, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

Sebagai catatan untuk Nilai SAKIP sampai saat laporan ini disusun, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2023, sehubungan hal tersebut maka pengukuran capaian Indikator Kinerja ini masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023**

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2022 dan tahun 2022 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan Malili	Nilai LAKIP	65.5	65.15	66.65 (B)	-	101,76%	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

a. **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk tahun 2023 belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk tahun 2022 nilai LAKIP Kecamatan Malili adalah 66,65 (B) dari target 65,5 ini berarti bahwa nilai evaluasi sakip baik dan tercapai, akan tetapi perlu ditingkatkan.

2. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini

Tabel 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	Nilai Score LAKIP (n-1)	2018	60	65.65	109%	Baik
2		2019	60	60.47	107%	Baik
3		2020	65	42.31	65.9%	Kurang
4		2021	60.18	53.28	88.33%	Cukup
5		2022	65.5	66.65	101.76%	Baik
		2023	65.15	-	-	-

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

GRAFIK TARGET DAN REALISASI NILAI LAKIP

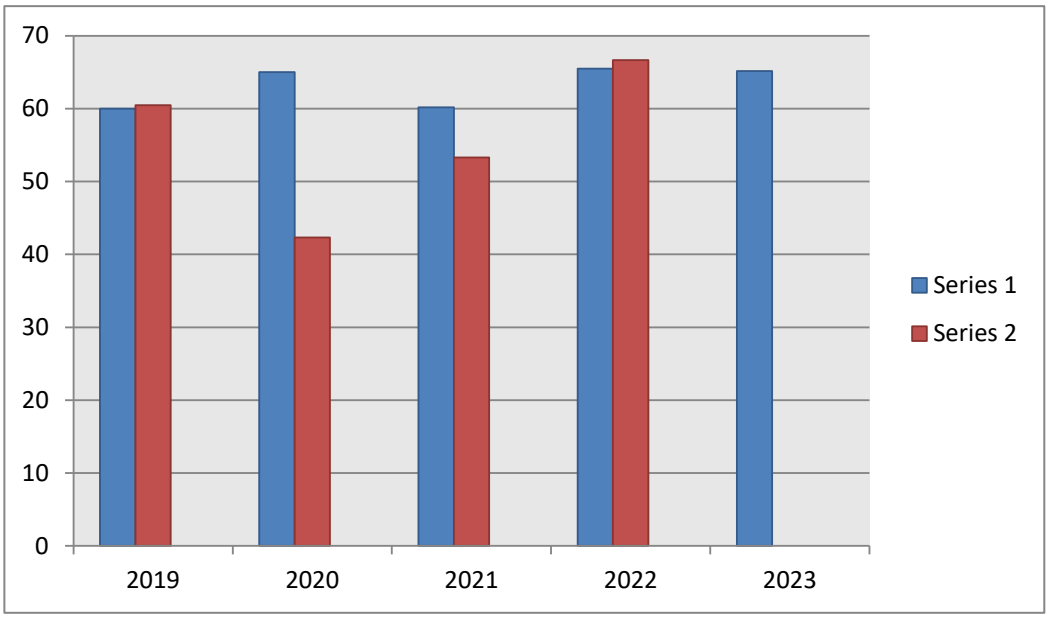

Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2019 sampai tahun 2023 bahwa pada tahun 2019 Nilai Skor LAKIP yang diperoleh 65.65 dengan kategori B. pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan memperoleh nilai 42,31 dengan kategori D. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dengan nilai 53.28 dengan Kategori CC. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan nilai 66,65 dengan Kategori B

sehingga dapat disimpulkan, perolehan nilai LAKIP kantor Kecamatan Malili mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap tahunnya sehingga akan dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai lakip.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2022		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Malili	Nilai Score LAKIP (n-1)	65.5	66.65 (B)	72

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu Skor LAKIP 66.65 dengan kategori B. Nilai SAKIP yang diraih Tahun 2022 ini menunjukkan hasil yang baik karna mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian indikator tersebut yaitu :

a. Kurangnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan
b. Kurangnya koordinasi dalam upaya mendapatkan target capaian kinerja

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PNS	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	4	1	1	1
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	5	1	2	2
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	4	1	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	4	1	1	-
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	4	1	1	-
8	Kasi Pelayanan Umum	1	4	1	1	1
JUMLAH		**8**	**25**	8	6	4
TOTAL		**33**		**18**		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Malili belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Malili yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Malili adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang disusun oleh Kantor kecamatan Malili, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan.

❖ **Hambatan :**

a) Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan.

b) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

❖ **Solusi:**

a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait dalam hal ini masing-masing Seksi dan Sub Bagian.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh

Kantor kecamatan Malili, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan.

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Malili, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

a) Keterlambatan pengumpulan data untuk bahan LAKIP dari Kepala Seksi.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

a) Menekankan kepada kepala seksi untuk segera menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan Malili sebanyak 22 orang. Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Malili.

b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Target dalam subkegiatan ini adalah penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran

kantor kecamatan malili. Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target dari sub kegiatan ini adalah barang yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja di kantor kecamatan Malili dilaksanakan dengan persentase 100%.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).

b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.

b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

4) Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Admministrasi Kepegawaian

Target dari sub kegiatan ini adalah laporan data administrasi kepegawaian. Tidak di temukan masalah didalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

b. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu alokasi anggaran Bimbingan Teknis kurang

❖ **Hambatan/Kendala**

Akan memaksimalkan anggaran Bimtek

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
b. Penyediaan bahan logistic kantor
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
e. Fasilitasi kunjungan tamu;
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

a) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
c) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder.

❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Target dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas di kantor kecamatan malili. Tidak di temukan masalah didalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
b) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
c) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.

2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

a) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
b) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.

❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu pada umumnya kegiatan yang apa pada program Penunjang Urusan Permerintah Daerah berjalan dengan baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebesar Rp.4.023.196.250,- Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.3.952.265.620,- dengan capaian **98.24%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET TRIWULAN I, II, III, IV *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023	Capaian (%)
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
				(6/5*100)
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**3.527.179.061**	**3.466.539.730**	**98.28**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**54.255.900**	**53.004.900**	**97.69**
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.761.300	40.283.390	98.83
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.001.600	4.518.280	90.34
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.089.800	4.950.460	97.26
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.403.200	3.252.770	95.58
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.160.209.312**	**2.123.674.813**	**98.31**
	- Penyediaan Gaji dan tujangan ASN	2.118.665.432	22.083.091.721	98.32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.543.880	40.583.092	97.69
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**18.734.920**	**17.846.522**	**95.26**

	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.734.920	17.846.522	95.26
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**54.771.669**	**49.627.425**	**90.61**
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.731.669	9.972.425	92.93
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.040.000	39.655.000	90.04
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**663.003.450**	**658.386.269**	**99.30**
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.485.300	6.245.000	65.84
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,618,100	63.270.450	99.45
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.430.000	10.825.000	94.71
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.900.000	11.880.000	99.83
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	130.635.000	130.275.000	99.72
	- Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	435.935.050	435.890.819	99,99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**459.788.810**	**457.608.691**	**99.53**
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.508.810	18.391.145	94.27
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.280.000	106.217.546	99.01
	- Penyediaan Jasa Pelayanan	333.000.000	333.000.000	100.00

	Umum Kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**116.415.000**	**106.390.610**	**91.39**
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.115.000	26.679.460	74.43
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.800.000	17.720.000	99.55
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.500.000	61.791.150	98.87
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**7.274.400**	**6.454.780**	**88.73**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**7.274.400**	**6.454.780**	**88.73**
	- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**7.274.400**	**6.454.780**	88.73
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**390.203.700**	**382.236.350**	**97,96**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**95.321.800**	**95.073.200**	**99.74**
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.006.800	31.941.800	99.80

	- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.315.000	63.131.400	99.71
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**294.881.900**	**287.163.150**	**97.38**
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.335.000	139.929.350	98.31
	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	152.546.900	147.233.800	96.52
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**19.877.550**	**19.190.360**	**96.54**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketentriban Umum	**14.875.450**	**14.447.030**	**97.12**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.882.700	11.564.450	97.32
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.992.750	2.882.580	96.32
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**5.002.100**	**4.743.330**	**94.83**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**5.002.100**	**4.743.330**	**94.83**

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**54.478.839**	**54.304.900**	**99.68**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**54.478.839**	**54.304.900**	**99.68**
	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**54.478.839**	**54.304.900**	**99.68**
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**24.182.700**	**23.540.000**	**97,34**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	**24.182.700**	**23.540.000**	**97,34**
	- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	**24.182.700**	**23.540.000**	**97,34**
TOTAL BELANJA		**4.023.196.250**	**3.952.265.620**	**98.24**

3.3. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) pada Tahun 2022 di tuangkan dalam matriks tidak lanjut sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres penyelesaian
1.	Agar menetapkan target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja realistis, menantang dan dapat dicapai, dengan mempertimbangkan capaian tahun lalu dan faktor faktor yang berpengaruh pada capaian kinerja	Telah ditetapkan tujuan serta target kinerja dan membuat rencana tindakan	Masing2 pejabat eselon membuat target kinerja serta membuat rencana kerjanya
2.	Membuat inovasi-inovasi yang menjadi nilai tambah kecamatan malili dan dapat di contoh oleh kecamatan lain baik lingkup kabupaten luwu timur, provinsi sulawesi selatanmaupun tingkat nasional	Telah dilakukan inovasi pada tahun 2023 yaitu melakukan roadshow ke desa-desa dengan cara tudang sipulung bersama warga masyarakat	Dilakukan sesuai jadwal kunjungan yang sudah dipersipkan
2.	Membuat inovasi-inovasi yang menjadi nilai tambah kecamatan malili dan dapat di contoh oleh kecamatan lain baik lingkup kabupaten luwu timur, provinsi sulawesi selatanmaupun tingkat nasional	Telah melakukan pengukuran keberhasilan kinerja melalui evaluasi pejabat eselon III dan IV	Masing2 pejabat eselon membuat laporan progres capaian kinerja dan melaporkan hasilx ke pimpinan dan di bahas bersama
3.	Memanfaatkan Teknologi informasi untuk pengumpulan dan analisis data hanya sehingga human error sangat kecil kemungkinan terjadi (data akurat dan update)	Telah dilakukan pengumpulan informasi melalui grup whatsapp sehingga memudahkan dalam pengiriman data dan tidak memakan waktu	Untuk saat ini sudah ada beberapa grup whatsaap kecamatan untuk memperlancar laporan kegiatan
4.	Dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja agar menjelaskan faktor	Telah dilakukan dengan memberi penjelasan pada setiap kegiatan	Laporan tersebut dituangkan pada laporan lakip dan

	penghambat dan solusi atau rekomendasi perbaikan secara detail	faktor penghambat dan solusi	laporan evaluasi triwulan
5.	Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan, seperti pemberian reward atas prestasi dan punishment atas kegagalan/ketidaktaatan	Sudah dilaksanakan pemberiaan reward dan punishment	Reward dan punishment hanya sebatas penyampaian lisan pada saat rapat internal

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Malili Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malili Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Malili Tahun 2022 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 93.26 dari target 80. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Nilai LAKIP belum bisa digambarkan capaiannya disebabkan penilaian LAKIP untuk Tahun 2023 baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. Pada tahun 2023 Kecamatan Malili telah menggunakan Anggaran Belanja sebesar Rp. 4.090.724.683 dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.258.936.598 atau setara dengan 96.05% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Malili telah optimal.

Pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Malili meliputi :

1. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan defenisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.

3. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).

❖ Langkah Antisipatif :

1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Malili, Februari 2024

CAMAT MALILI

NASIR,SP.M.Si
NIP. 198111162010011015

LAMPIRAN – LAMPIRAN

i. PERJANJIAN KINERJA
ii. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU